

# EFFECT OF MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS ON DEVELOPMENT OF RURAL INFRASTRUCTURE IN BENGKATAN BENGKALIS BENGKALIS REGENCY

A. Tarmizi Yussa<sup>1</sup>, Dr. Rosmayani, S.Sos, M. Si,<sup>2</sup> Jordy Putra Prananda<sup>3</sup>,

<sup>1,2,3</sup>Postgraduate Program of Islamic University of Riau

E-mail: [tarmiziuir@soc.uir.ac.id](mailto:tarmiziuir@soc.uir.ac.id), [rosmayani.fisipol@soc.uir.ac.id](mailto:rosmayani.fisipol@soc.uir.ac.id), [jordyputra04@gmail.com](mailto:jordyputra04@gmail.com)

## KEYWORDS

Village Fund Management  
Rural Infrastructure  
Development

## Kata Kunci

Pengelolaan Dana Desa  
Pembangunan Infrastruktur  
Perdesaan

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the influence of village fund management on rural infrastructure development in Bengkalis Sub-district, Bengkalis Regency. This study uses a quantitative approach. The sample area of this study consists of 28 villages with the number of respondents as many as 56 people consisting of Village Head and Technical Implementation of Village Financial Management (PTKD) se Sub Bengkalis. This research uses descriptive method with quantitative approach by using simple linear regression analysis. From the research results it is known that the management of Village Funds implemented in the District Bengkalis Bengkalis District has been implemented in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 About Management of Village Finance. From the results of research conducted on the influence of Village Fund management on rural infrastructure development is known that the management of Village Funds have a positive and significant impact on rural infrastructure development in Bengkalis District Bengkalis with the calculation of simple linear regression analysis of 0.843 or 84.3% with very strong influence. This means that there is a positive relationship between the Village Fund Management and Rural Infrastructure Development. Based on the results of this study, it can be concluded that with the increasing quality of Village Fund Management implemented by the Technical Management Team of Village Finance Management (PTKD), it will also increase the results of rural infrastructure development in Bengkalis Sub-district, Bengkalis Regency.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur perdesaan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Wilayah sampel penelitian ini terdiri dari 28 Desa dengan jumlah responden sebanyak 56 orang yang terdiri dari Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD) se Kecamatan Bengkalis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap pengaruh pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur perdesaan diketahui bahwa pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur perdesaan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dengan hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana sebesar 0,843 atau 84,3% dengan pengaruh sangat kuat. Artinya terjadi hubungan positif antara Pengelola Dana Desa dengan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan semakin meningkatnya kualitas Pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD) maka akan semakin meningkat pula hasil pembangunan infrastruktur perdesaan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

## 1. Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur suatu negara harus sejalan dengan kondisi makro ekonomi negara yang bersangkutan. Dalam 30 tahun terakhir ditenggarai pembangunan ekonomi Indonesia tertinggal akibat lemahnya pembangunan infrastruktur.

Menurunnya pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia dapat dilihat dari pengeluaran pembangunan infrastruktur yang terus menurun dari 5,3% terhadap GDP (*Gross Domestic Product*) tahun 1993/1994 menjadi sekitar 2,3% (2005 hingga sekarang). Padahal, dalam kondisi normal, pengeluaran pembangunan untuk infrastruktur bagi negara berkembang adalah sekitar 5-6 % dari GDP. Semakin kurangnya pengeluaran terhadap

infrastruktur membuat dengan sendirinya cakupan dan mutu pelayanan infrastruktur menjadi rendah. Lemahnya pembangunan infrastruktur di tingkat pedesaan berefek terhadap rendahnya proses mobilisasi sosial ekonomi dan mutu pelayanan masyarakat.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan dipedesaan. Menurut Santoso sasaran pembangunan desa diantaranya pertama, membentuk *good governance* yang partisipatoris, kedua memperkuat institusi administrasi pemerintahan di tingkat desa (Santoso, 2003)

Persoalan akuntabilitas kinerja alokasi anggaran Desa tetap menjadi pusat perhatian publik. Persoalan ini menjadi penting dikemukakan untuk menampilkan karakter pemerintah yang akuntabel (*governance administration*) dalam membuat kebijakan anggaran dan pertanggungjawabannya ke arah proyek-proyek yang benar-benar prioritas dan penting di desa-desa. Hal ini menjadi persoalan penting di negara-negara tertinggal di Asia. Dikutip dari Word Bank report persoalan buruknya kebijakan dan lemahnya kinerja sektor publik menimbulkan kemiskinan di desa-desa di Asia. Maka dari itu perlu ada upaya untuk “ bulding effectves institution and accountable public institutions is arqubly the core chalennge for sustainabel poverty reduction (The Word Bank, 2000:1). Apalagi Kabupaten Bengkalis termasuk kabupaten APBD Plus yang alokasi anggarannya selalu di sorot.

Pandangan dari sudut administrasi publik bahwa anggaran publik itu sekecil apapun mesti dialokasikan dengan benar kemudian di pertanggungjawabkan dengan baik. “*the effective budgetary process in public domain revognises the necessities of choice* ( Kevitt dan Lawton, 1994 :56) proyek-proyek pembangunan di negara-negara yang sedang membangun dapat mempengaruhi proses melalui mana perubahan ekonomi terjadi dengan cara mempertalikan pasar, menyatukan aktivitas produktif di dalam swasta dan sektor publik ( Rondinelli, 1990 :6) Hal ini hanya mungkin dapat wujud melalui pemerintahan yang *governance administrasi dan professional, to the importance of professional expertise in policy administration.* (Meir and Krause, 2000:2) *The performance, governed oriented reformer may have improved managerial efficiency.....*

*the emergence of this new concept of ‘governance led the increasing concern about the quality democracy at the local level* (Miller; Malcolm and Stoker ( 2000:19-21). *Execute policies which more generally improve the quality of life for all.* (Frederickson, 2010:9) *the local government is widely known as a vital intrument for rural transformation and machinery for effective delivery of social economic service the people.* ( Oyedele;Osezua; Abdul Kareem; Ishola, 2002)

Desa ke depan di hadapkan pada tantangan bukan saja memasuki persaingan pasar bebas dan terbentuknya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dalam beberapa hal ini Indonesia dinilai belum siap menghadapi MEA 2015. Hal ini disebabkan daya saing ekonomi nasional dan daerah belum siap. Keterbatasan infrastruktur dalam negeri menjadi masalah krusial di masa mendatang. (Warta Ekspor, Januari 2015). Untuk menciptakan daya saing desa masih di hadapkan pada resistensi pemahaman terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang belum sepenuhnya di pahami desa dan supra desa yang di akibatkan proses pembelajaran desa yang keliru selama ini dalam proses pelaksanaan program-program yang cenderung mengimposisi peran desa (pemerintah desa dan masyarakat desa). Otonomi daerah cenderung jamak menyediakan karpet merah bagi kelompok usaha untuk mengelola sumber daya alam daerah. Tidaklah mengherankan bahwa di era otonomi daerah lengket dengan paradigma *market driven development* dan desa masih terpinggirkan.(Eko dkk, 2014).

Bila hal ini tidak dicermati dengan baik oleh Pemerintah baik di pusat ataupun Pemerintahan yang ada di daerah maka hal ini bukan saja berdampak tidak baik khususnya bagi masyarakat yang hidup diwilayah pedesaan namun secara tidak langsung akan memperburuk kondisi masyarakat desa yang diakibatkan oleh adanya persaingan global tersebut. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia.(Hernowo, 2004). Pembangunan di Bengkalis pada dekade awal otonomi daerah banyak terjadi pemborosan (inefisiensi) yang pembangunannya tersebar di pulau-pulau pesisir timur Sumatra seperti pulau Rupat, Tebing Tinggi dan Bengkalis, dimana banyak proyek yang tidak berfungsi, terbengkalai dan alokasinya tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan kebutuhan riil yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Untung saja ketika kondisi reformasi berangsur melemah dimana penindakan atas penyimpangan pembangunan belum dijalankan dengan konsisten. (Tarmizi, 2010)

Dalam menghadapi permasalahan tersebut khususnya dalam upaya pelaksanaan pembangunan dan pemberdaya masyarakat perdesaan, maka saat ini di bentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mempunyai mandat untuk menjalankan NAWACITA Jokowi-JK, khususnya NAWACITA Ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa.” Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa. Dalam Peraturan tersebut pada pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa: “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”

Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka saat ini Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, maka untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa, (Kemenkeu RI:2018:46). Adapun unsur pengelola Dana Desa di Desa adalah Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), (Kemenkeu RI:2018:48).

Pelaksanaan program Dana Desa dilaksanakan diseluruh wilayah Desa termasuk di seluruh wilayah desa yang ada di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Untuk wilayah Kabupaten Bengkalis pada tahun total Dana Desa yang diterima Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2017 ada sebesar Rp. 108,169,870,001,- yang didistribusikan secara bertahap kepada 136 Desa yang ada di Kabupaten Bengkalis. Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Bengkalis dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis No. 92 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017. Penentuan besarnya dana desa di setiap desa ditentukan oleh rasio jumlah penduduk desa dengan penduduk Kabupaten, rasio jumlah penduduk miskin desa dengan jumlah penduduk miskin Kabupaten, rasio luas wilayah desa dengan luas wilayah Kabupaten, rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Kabupaten.

Dalam pelaksanaan program Dana Desa di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, hingga saat ini masih ditemui berbagai permasalahan antara lain adalah: Sosialisasi pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan oleh BPPMD masih minim sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman bagi pengelola Dana Desa dalam melaksanakan tahapan prosedur pelaksanaan Dana Desa. masyarakat di Kecamatan Bengkalis khususnya di Desa Kelapa Pati dan Desa Kelebuk cenderung untuk tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan program Dana Desa, Alokasi Dana Desa yang disalurkan belum memadai untuk digunakan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur perdesaan sehingga beberapa program pembangunan infrastruktur perdesaan tidak dapat dilaksanakan, serta kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membangun desanya sendiri. Hal ini dapat diketahui dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan jalan desa, perbaikan mushala dan pembangunan fisik lainnya yang didanai dari Dana Desa.

Idealnya dengan di alokasikan dana desa yang cukup besar kepada pemerintah desa diperkirakan dapat mengubah wajah pembangunan infrastruktur perdesaan di Bengkalis. Namun apakah programnya tepat sasaran dan diikuti dengan praktek pembangunan yang efektif. Oleh dalam proses penelitian ini dilakukan rumusan masalah penelitian yaitu bagaimanakah pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan bahwa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut, Keuangan desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang akan berhubungan dengan kelangsungan hak dan kewajiban Penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa di danai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang di selenggarakan oleh pemerintah desa di danai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa memuat ketentuan yang terkait dengan keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan desa, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selanjutnya, Permen ini menyebutkan bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa, yang juga mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Dalam tahap perencanaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan kembali peran Bupati/Walikota dalam mengevaluasi Rancangan APBDes yang dilakukan melalui Camat. Menurut Permendesa ini, apabila hasil evaluasi Bupati/Walikota tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kades dan Kades tetap menetapkan Ranperdes tersebut menjadi Perdes, Bupati/Walikota berwenang untuk membatalkan Perdes dengan Keputusan Bupati/Walikota. Jika Perdes tersebut dibatalkan, maka berlaku pagu APBDes tahun sebelumnya dan Kades hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.

Pada tahap pelaksanaan, Kades menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/ Walikota. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. Menurut peraturan ini, pemerintah Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya. Pemerintah Kabupaten/ Kota harus menyediakan pendampingan dan fasilitasi, melalui pembentukan satuan kerja khusus pembinaan implementasi Undang-undang Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Tugas dan fungsi satuan kerja

husus pemerintah Kabupaten/Kota yang utama adalah melakukan sosialisasi kebijakan dan regulasi pusat dan daerah (Kabupaten/Kota), pembinaan serta pengendalian implementasi Undang-undang Desa secara umum, dan secara khusus terkait penyaluran dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, serta penanganan pengaduan dan masalah terkait hal tersebut. Pembiayaan pendampingan, fasilitasi dan pembinaan, serta pengelolaan Satuan Kerja khusus Kabupaten/Kota dilakukan sesuai mekanisme penganggaran di daerah dan bersumber dari APBD Kabupaten/ Kota. Penyusunan Model dan Instrumentasi Kebijakan Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa dan dapat melimpahkan tugas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang. Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku, secara berkala. Kemudian SKPD yang berwenang melakukan penilaian terhadap hasil pemantauan dan evaluasi. Hasil penilaian tersebut disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan Masyarakat Desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa), fisik (raga), intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Suatu pembangunan akan berhasil jika masyarakat turut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena pembangunan merupakan suatu yang mengarah pada perubahan maka Fischer dalam (Adimihardja:2004) mengemukakan bahwa ada beberapa hak masyarakat untuk mengetahui dan terlibat dalam setiap aspek perubahan, yaitu :

- Berhak mengetahui masalah apa yang ada (dari perspektif praktisi) dalam bahasa yang jelas dan dapat dimengerti.
- Berhak berpartisipasi dalam memilih tujuan dan sasaran.
- Berhak mengetahui apa yang akan terjadi selama proses intervensi, siapa yang melakukan, siapa melakukan untuk siapa dan dibawah kondisi apa ?

- d. Berhak mengetahui berapa lama kegiatan paling lama dilakukan.
- e. Berhak mengetahui metode-metode alternatif dalam membahas permasalahan dan kemungkinan-kemungkinannya dalam memecahkan kesulitan yang terjadi.
- f. Berhak mengetahui seberapa besar kegiatan itu dapat membebani dan mengetahui nilai pelayanan yang tersedia.
- g. Berhak mengetahui catatan-catatan yang disimpan dan siapa yang boleh melihatnya.
- h. Berhak mengetahui lebih dahulu terminasi pelayanan.
- i. Berhak mengambil kendali atas kehidupan dan semampunya.
- j. Berhak menjadi bagian dari dan diinformasikan tentang evaluasi mengenai situasi dirinya, agar ia mendapat dan mengambil keputusan berdasarkan data tersebut.

Target pembangunan desa yang obyektif adalah pembangunan yang jelas dan nyata sehingga menjadikan masyarakat yang tinggal di pedesaan akan semakin nyaman dan merasa tenang. Program pembangunan desa misalnya adalah:

1. Pembangunan di bidang sarana dan prasarana desa (Infrastruktur)  
 Pembangunan dibidang infrastruktur ini dimaksudkan untuk kelancaran segala bentuk aktifitas yang dilakukan oleh desa yang bersangkutan. Pembangunan infrastruktur di desa tersebut harus di dasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga memungkinkan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Di sisi lain infrastruktur yang di bangun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab dalam mengelola dan memelihara setelah proyek tersebut berakhir, dan di dalam membangun infrastruktur desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat sehingga sumber daya yang di milki oleh desa yang terbatas dapat di manfaatkan secara efektif dan efisien (Suriadi, 2005:61).
2. Pemberdayaan masyarakat  
 Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, Perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama (Suriadi, 2005:41). Menurut kodratnya, Manusia tidak dapat hidup menyendiri, Tetapi harus hidup bersama atau berkelompok dengan manusia yang lain yang dalam hubungannya saling membantu untuk dapat mencapai tujuan hidup menurut kemampuan dan kebutuhannya masing-masing

atau dengan istilah lain adalah saling berinteraksi. Menurut Grigg dalam (Kodoatie, 2003) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pada prinsip pembangunan semestinya konsisten menerapkan nilai dan praktik administrasi untuk mencapai efektifitas dan efisien Weidner dalam Rathod (2010 :3) *development administration is basically "action oriented and goal oriented administrative system"*. Menurut Green dan Haines dalam Adi, (2013:240) infrastruktur dapat berupa jalan raya, jembatan, jalan kereta api, sarana pembuangan limbah, sarana air bersih, jaringan telepon, dan lain sebagainya. Dikatakan oleh Badan Penelitian dan Pembangunan Dalam Negeri dalam (Ulyani 2013:19) pembangunan sarana fisik diartikan sebagai alat atau fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana fisik seperti dimaksud, berupa :

- a) Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan, dll
- b) Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar
- c) Prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah dan puskesmas dan prasarana produksi saluran air.

Dari kerangka teoritis diatas maka penulis mengembangkan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Diduga terdapat pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis
- H0: Diduga terdapat pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

## 2. Metodologi

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe kuantitatif, yakni menggambarkan, keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian dengan cara mengumpulkan data dalam bentuk tabel-tabel kemudian mengklasifikasikan dan menganalisisnya sehingga diperoleh perumusan analisa terhadap masalah yang dihadapi. Data dan informasi dikumpulkan dengan menggunakan kuisioner, serta data dan informasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan variabel

penelitian. Bertitik tolak dari pemanfaatan data tersebut, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian *surveydeskriptif*. Pendekatan deskriptif yaitu suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan. (Singarimbun, 1987:8)

Penelitian ini mengambil lokasi diseluruh wilayah Desa pelaksana program Dana Desa yang ada di Kecamatan Bengkalis Tahun 2017. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan alasan bahwa Kecamatan Bengkalis adalah merupakan wilayah kecamatan yang berada dipusat kota Kabupaten Bengkalis, yang diharapkan dapat menjadi barometer pelaksanaan program Dana Desa di Kabupaten Bengkalis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala Desa yang ada di wilayah Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis yang merupakan wilayah Desa penerima Dana Desa Tahun 2017 di Kecamatan Bengkalis. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 56 orang, dimana jumlah ini adalah jumlah seluruh Kepala Desa di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD) pada seluruh Desa penerima Dana Desa Tahun 2017 di Kecamatan Bengkalis yang ditetapkan sebagai wilayah Populasi penelitian. Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sampling jenuh atau sensus. Menurut Sugiyono (2008:122), Sampling jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

#### **ANALISA DATA**

##### **Uji Validitas dan Reliabilitas**

##### **Uji Validitas**

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen Suharsimi (2006:168). Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan analisis butir, yaitu dengan mengkorelasikan tiap butir pertanyaan dengan skor total. Kemudian dikonsultasikan antara nilai  $r$  tabel dengan taraf signifikansi 5% atau taraf kepercayaan 95%.

##### **Reliabilitas**

Untuk mengukur reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus *One Shot. One Shot* atau pengukuran sekali, artinya pengukuran hanya dilakukan sekali, kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan, Ghazali (2006:42). Uji reabilitas dalam penelitian ini berbantuan *SPSS for windows release Versi 16.0* dengan uji statistik *Cronbach*

*Alpha*. Instrumen dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,60, Nunnally dalam Ghazali (2005:42).

##### **Uji Persyaratan Analisis**

##### **Uji Normalitas**

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Bengkalis yang mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas data, juga bisa menggunakan uji statistik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Jika nilai signifikansi > 0,05 maka data dalam penelitian berdistribusi normal.

##### **Uji Linieritas**

Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifik model yang digunakan sudah benar atau tidak. Jika nilai signifikansi pada tabel ANOVA < 0,05 maka model sebaiknya berbentuk linear. Jika data berbentuk linear maka penggunaan analisis regresi pada pengujian hipotesis dapat dipertanggungjawabkan, namun jika tidak linear maka harus digunakan analisis non linear.

##### **Regresi Linier Sederhana (Hipotesis) : Pengaruh Pengelolaan Dana Desa (X) Terhadap Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Y)**

Dalam melakukan uji hipotesis pada penelitian ini, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dilakukan uji regresi linier sederhana dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Uji ini dimaksudkan untuk melihat apakah persamaan regresi yang diperoleh "berarti" apabila digunakan sebagai kesimpulan antara variabel yang dianalisis. Uji linieritas dengan menggunakan ANOVA. Regresi linier apabila  $F_{hitung}$  lebih kecil dari  $F_{tabel}$  pada taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$  atau  $\alpha = 0,01$

$H_0 : \rho = 0$  artinya X dan Y berpengaruh

Artinya : Pengelolaan Dana Desa berpengaruh pada Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

$H_1 : \rho \neq 0$  artinya X dan Y tidak berpengaruh

Artinya : Pengelolaan Dana Desa tidak berpengaruh pada Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **Analisis Deskriptif Data Penelitian**

Gambaran data hasil penelitian dapat digunakan untuk memperkaya pembahasan, melalui gambaran data tanggapan responden dapat diketahui bagaimana tanggapan responden terhadap setiap variabel yang

sedang diteliti. Agar lebih mudah menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap skor tanggapan responden. Analisis deskriptif dilakukan mengacu kepada setiap variabel yang ada pada variabel yang diteliti.

#### **Variabel Pengelolaan Dana Desa (X)**

Hasil data lapangan yang diperoleh menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai Pengelolaan Dana Desa (X) termasuk dalam kategori baik. Hasil tanggapan ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dalam program Dana Desa tahun 2017 sudah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD) di Kecamatan Bengkalis. Namun masih ditemukan di beberapa desa pelaksana beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Sosialisasi pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan oleh BPMPD masih minim sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman bagi pengelola Dana Desa dalam melaksanakan tahapan prosedur pelaksanaan Dana Desa
2. Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD) di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis belum melaksanakan konsep pembangunan partisipasi masyarakat desa yang di buktikan dengan prinsip partisipatif, responsive, transparansi, guna mewujudkan setiap program yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat Desa yang diadakan melalui Musrembangdes. Beberapa usulan dari masyarakat yang disampaikan terkait dengan pembangunan infrastruktur perdesaan hanya ditampung oleh tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD), namun pada realisasi pelaksanaannya, usulan masyarakat tersebut tidak dapat dilaksanakan.
3. Pada tahapan pelaksanaan program Dana Desa tahun 2017 di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pelaksanaan program tidak seluruhnya mampu memprioritaskan usulan yang disampaikan oleh masyarakat desa hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan dan juga alokasi Dana Desa yang kurang memadai untuk dilakukannya pembangunan infrastruktur perdesaan yang diharapkan masyarakat.
4. Pada tahapan penatalaksanaan program Dana Desa tahun 2017 di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pelaksana program tidak seluruhnya mampu memprioritaskan usulan yang disampaikan oleh masyarakat desa hal ini disebabkan oleh karena kurang memadainya pendanaan yang ada untuk dilakukannya pembangunan infrastruktur perdesaan yang diharapkan masyarakat

Pada tahapan pelaporan Dana Desa Tahun 2017 permasalahan yang sering terjadi adalah berupa keterlambatan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan. Kendala keterbukaan terhadap masyarakat berupa kurang adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pelaporan Dana Desa, tertutupnya pemerintah desa dan kurang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan pelaporan dana desa. Kurangnya pelatihan yang dilaksanakan kepada tim teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD) khususnya pelatihan penyusunan RAB sehingga menyulitkan bagi tim teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD) yang ingin membuat laporan pertanggungjawaban

#### **Variabel Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Y)**

Dari hasil tanggapan responden penelitian tersebut juga diketahui bahwa pembangunan infrastruktur perdesaan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dianggap sebahagian besar responden penelitian sudah dilaksanakan dengan baik. Namun sebahagian responden lainnya menganggap bahwa pelaksanaan program Dana Desa Tahun 2017 belum terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat. Adapun hal-hal yang dianggap masih belum terselesaikan dalam pembangunan infrastruktur Perdesaan hingga program Dana Desa Tahun 2017 selesai dan sekaligus dianggap sebagai faktor-faktor kurang maksimalnya penyelenggaraan program tersebut antara lain sebagai berikut :

Tidak terlaksananya pembangunan Pasar Desa, rehab pembangunan mushala, Kantor Desa dan juga pembangunan Jembatan tidak dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Desa yang ada di Kecamatan Bengkalis karena alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing Masing Desa pelaksana program tidak mencukupi.

Kurangnya kerjasama ataupun swadaya yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan program Dana Desa khususnya dalam pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan desa, pembangunan jembatan dan rehab mushala di beberapa wilayah desa di Kecamatan Bengkalis

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menghibahkan lahan yang akan digunakan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur fisik perdesaan.

Pengerjaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dengan terburu-buru sehingga perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sering tidak sesuai dengan prosedur atau waktu yang telah ditetapkan.

**Regresi Linier Sederhan Pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Perdesaan**

Pada penelitian ini, analisis regresi sederhana dimaksudkan untuk mengetahui adanya pengaruh antara Pengelolaan Dana Desa (X) terhadap Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Y). Tujuannya untuk meramalkan atau memperkirakan nilai variabel dependen dalam hubungan sebab-akibat terhadap nilai variabel lain.

Model regresi sederhana yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

- Y : Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
- a : Konstanta/intercept
- b : Koefisien regresi
- X : Pengelolaan Dana Desa

Dengan menggunakan bantuan aplikasi program SPSS, didapat *output* hasil perhitungan regresi linier sederhana sebagai berikut :

**Tabel 1. Hasil Perhitungan Nilai Koefisien Persamaan Regresi**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.987	2.690		.739	.0063
Pengelolaan Dana Desa	.804	.070	.843	11.498	.000

a. Dependent Variable: Pembangunan Infrastruktur

Berdasarkan hasil tabel 1 diatas didapat t hitung sebesar 14,764, dengan derajat kebebasan (df) = n-2. Maka t tabel dari 56 responden 2.0049. Karena t hitung > t tabel yaitu 11.498 > 2.0049 dengan tingkat signifikan pada tabel sebesar 0.463 yang artinya 0.0063 < 0.05 maka Ho ditolak dan H1 diterima berarti dapat diketahui bahwa Pengelolaan Dana Desa secara signifikan akan mempengaruhi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada tingkat standar 0,843 atau 84,3%

Dengan demikian hubungan antar variabel dapat diinterpretasikan memiliki hubungan yang **sangat kuat**, jika dibandingkan dengan kategori koefisien korelasi menurut Sugiyono (2008: 242) sebagai berikut:

- 0,00 – 0, 199 = sangat rendah
- 0,20 – 0, 399 = rendah

0,40 – 0, 599 = sedang

0,60 – 0, 799 = kuat

**0,80 – 1, 000 = sangat kuat**

Berdasarkan hasil data penghitungan di atas, maka persamaan regresi yang muncul adalah sebagai berikut:

$$Y = 1.987 + 0,804 X$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar 1.987, jika Pengelolaan Dana Desa (variabel X) nilainya adalah = 0, maka Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (variabel Y) nilainya positif, yaitu sebesar 1.987. Selanjutnya koefisien regresi variabel Pengelolaan Dana Desa (X) sebesar 0,804; artinya jika Pengelolaan Dana Desa mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,804 satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Pengelolaan Dana Desa dengan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, semakin meningkat kualitas Pengelolaan Dana Desa maka semakin meningkatkan pula Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis..

**Analisis Korelasi Pearson Product Moment**

Analisis korelasi *Pearson Product Moment* adalah suatu analisis yang digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua atau lebih variabel bila data variabel berbentuk interval atau rasio dan sumber data dari masing-masing variabel adalah sama (Sugiyono, 2008;228). Dengan menggunakan bantuan aplikasi program SPSS didapat *output* hasil koefisien korelasi sebagai berikut:

**Tabel 2. Nilai Koefisien Korelasi Pearson Product Moment**

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Pembangunan Infrastruktur * Pengelolaan Dana Desa	Between Groups	(Combined)	132.717	8	16.590	18.637	.000
		Linearity	123.935	1	123.935	139.231	.000
		Deviation from Linearity	8.783	7	1.255	1.409	.224
	Within Groups		41.837	47	.890		
	Total		174.554	55			

Berdasarkan data pada tabel 2 diatas, diperoleh nilai sigifikansi sebesar 0,224 < 0,05 yang artinya terdapat hubungan linier secara signifikan antara variabel Pengelolaan Dana Desa (X) dengan variabel

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

### Analisis Koefisien Determinansi

Analisis koefisien determinansi adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Koefisien determinansi adalah kuadrat dari koefisien korelasi (Sugiyono, 2008:231). Nilai koefisien determinansi dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:

**Tabel 5.22 Hasil Uji Koefisien Determinansi**

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.843 <sup>a</sup>	.710	.705	.968

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Dana Desa

Dari hasil pengolahan pada tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwa sumbangan atau kontribusi Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Perdesaan sebesar 0,71 (71%) sedangkan sisanya sebesar 29% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak ditemukan dalam penelitian ini.

### Pengujian Hipotesis

Berdasarkan pengolahan data hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya angka bernilai positif pada kolom *Constant* yang menunjukkan koefisien konstanta (a) jika diinterpretasikan dalam persamaan regresi linier sederhana. Koefisien konstanta bernilai positif dapat diartikan bahwa terjadi hubungan positif antara Pengelolaan Dana Desa dengan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, semakin meningkat kualitas Pengelolaan Dana Desa, maka semakin meningkat pula Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui adanya pengaruh signifikan sumbangan variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dilihat pada hipotesis yang diajukan oleh penulis disebutkan bahwa:

H1: Diduga terdapat pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

H0: Diduga terdapat pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Kriteria pengambilan keputusan:

t hitung > t tabel maka H1 diterima, pada  $\alpha = 0,05$  (5%)

14,764, dengan derajat kebebasan (df) = n-2. Maka t tabel dari 56 responden 2.0049. Karena t hitung > t tabel yaitu 11.498 > 2.0049 dengan tingkat

signifikan pada tabel sebesar 0.463 yang artinya  $0.0063 < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima berarti dapat diketahui bahwa Pengelolaan Dana Desa secara signifikan akan mempengaruhi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada tingkat standar 0,843 atau 84,3%

Program dana desa sudah memberikan kontribusi terhadap Pembangunan Infrastruktur Perdesaan seperti :

- Pembangunan prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan dll.
- Pembangunan Jembatan Desa.
- Pembangunan prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan Puskesmas

Berdasarkan hasil data penghitungan regresi linier sederhana yang telah dilakukan maka diketahui hasil regresi sebagai berikut:

$$Y = 1.987 + 0,804 X$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar 1.987, jika Pengelolaan Dana Desa (variabel X) nilainya adalah = 0, maka Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (variabel Y) nilainya positif, yaitu sebesar 1.987. Selanjutnya koefisien regresi variabel Pengelolaan Dana Desa (X) sebesar 0,804; artinya jika Pengelolaan Dana Desa mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,804 satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Pengelolaan Dana Desa dengan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, semakin meningkat kualitas Pengelolaan Dana Desa maka semakin meningkatkan pula Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

## 4. Kesimpulan

Dari hasil analisa yang dilakukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana diketahui memiliki pengaruh *sangat kuat* dan bernilai positif. Berdasarkan hasil data penghitungan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur perdesaan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Pengelolaan Dana Desa dengan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, semakin meningkat kualitas Pengelolaan Dana Desa maka semakin meningkatkan

pula Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan simpulan yang telah ditulis sebelumnya maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Disarankan agar upaya peningkatan kemampuan dari seluruh Kepala Desa dan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD) di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis khususnya dalam menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana agar lebih ditingkatkan, sehingga laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dapat dilaksanakan tepat waktu dan tepat guna dengan cara meningkatkan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan juga kegiatan sosialisasi program Dana Desa. Agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur di perdesaan dapat dilaksanakan dengan baik dan pembangunan infrastruktur berbagai sarana prasarana yang ada di desa dapat lebih ditingkatkan dan dilaksanakan dengan lebih akuntabel
2. Motivasi dan pemahaman pembangunan infrastruktur kepada seluruh masyarakat Desa di Kecamatan Bengkalis agar lebih ditingkatkan karena dengan meningkatnya motivasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pelaksanaan program Dana Desa, maka diharapkan partisipasi masyarakat serta swadaya masyarakat akan semakin meningkat. Selanjutnya agar Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD) melaksanakan program Dana Desa bekerja benar-benar dengan standar pelaksanaan program ditetapkan dan mengedepankan skala prioritas, kemudian ditetapkan dengan seksama dalam RAPBDes. Dalam penelitian ditemukan program pembangunan menggunakan Dana Desa seperti pembangunan Pasar Desa, pembangunan jembatan yang tidak dilaksanakan dalam program Dana Desa di Kecamatan Bengkalis Tahun 2017
3. Partisipasi dan swadaya masyarakat terhadap pelaksanaan program Dana Desa khususnya di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis sangat menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dipedesaan. Untuk itu sangat diharapkan agar masyarakat ikut serta berpartisipasi aktif bekerjasama dalam berbagai sektor untuk lebih menggiatkan program pembangunan infrastruktur desa di Bengkalis.

## 5. Daftar Pustaka

Adi. I. R. 2013. *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Raja Grafindo Perkasa Jakarta.

- Adimihardja, 2004, *Participatory Research Appraisal dal Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Edisi Kedua, Humaniora Utama Press. Bandung
- Arikunto, Suharsimi., 2006, *Metode Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta
- Eko, Sutoro. 2014. *Desa Membangun Indonesia. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) dan ACCESS*. Yogyakarta.
- Frederickson H. George. 2010. *Social Equity and Public Administration, Origins, Developments, and Application*. New York.. Sharpe. ME.
- Ghozali, Imam, 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate dalam Program SPSS*, Badan Penerbit Salemba Empat, Semarang
- Hernowo. 2004. *Self Digesting; Alat Menjelajahi dan Mengurai Diri*. Mizan Media Utama. Bandung
- Kevitt Mc. David dan Lawton Alan. 1994. *Public Sector Management Theory, Critique and Practice*. London. Sage Publications
- Kodoatie, R.J. 2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Krause A. George dan Meir.J, Kenneth. 2003. *The Scientific Studi Bureaucracy Overview (ed) Politics, Policy adn Organizations: Frontier ini the Scientific Study of Bureaucracy*. The University Michigan Press.
- Masri Singarimbun et al. 1987. *Metode Penelitian Survai*. Edisi Revisi. Penerbit PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta
- Miller L. William, Dickson Malcolm and Stoker Gerry. 2000. *Models of Local Governance Public Opinion and Political Theory In Britain*. London. Palgrave
- Muhammad Eko Atmojo, dkk. 2017. *Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo*. Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Univeristas Muhammadiyah. Yogyakarta
- Oyedele, Samuel Olanrewaju; Osezua, Ehiyamen Mediayanos; Abdul Kareem, Abdulrazaq Kayode; Ishola, Aburazaq Ajadi. *Local Government Administration National Development ini Nigeria : Chalenge and Prospects*. <https://www.researchgate.net/publications/320799984>
- Rathod. PB 2010. *Element Of Development Administration, Theory and Practice*. ABD Publisher. Japur India
- Rondinelli A. Dennis, 1990. *Proyek Pembangunan Sebagai Manajemen Terpadu pendekatan Adaptif Terhadap Administrasi Pembangunan*. Jakarta. Bumi Aksara
- SantosoPurwo. 2003. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Yogyakarta : Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah Gajahmada.

Sugiyono.2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung  
Tarmizi. Ahmad. 2010. *Administrative Reform and Local Development “ Case Studies Era Autonomy in Bengkalis Regency Riau Province*.P. hD. Thesis University Utara Malaysia. Sintok Kedah. Malaysia.  
Suriadi, Agus. 2005. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. USU Medan  
Ulyani, Grand. 2013. *Penelitian dan Pembangunan*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta  
The World Bank. *Reforming Public Institutions and Strengthening Governace. A Word Bang Strategi*, November 2000. Public Sector Group Poverty Reduction and Economic Management (PREM) Net Work

#### ***Undang-Undang/Peraturan***

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa  
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa  
Peraturan Bupati Bengkalis No. 92 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017  
Warta Ekspor. Ditjen PEN/WAT/04/1/2015. *Peluang dan Tantangan Indonesia Pasar Bebas ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*